

PENJABARAN ARAH TAKTIK PERJUANGAN DALAM BIDANG KEILMUAN

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

“Buatlah ilmu berdwitunggal dengan amal! Malahan, angkatlah derajat kemahasiswaanmu itu kepada derajat mahasiswa patriot, yang sekarang mencari ilmu, untuk kemudian beramal terus-menerus di hadirat wajah Ibu Pertiwi!”

-Bung karno, UGM, 19 September 1951-

Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Ilmu bukan sekadar pengetahuan (*knowledge*), tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Ilmu pengetahuan adalah produk dari epistemologi.

Tentunya dalam ilmu pengetahuan tersebut tidak bebas nilai seperti yang dikatakan orang pada umumnya. Dalam buku *Arkeologi pengetahuan* yang ditulis oleh Michel Foucault yang menyatakan bahwa ia menolak bahwa ilmu pengetahuan itu dikejar untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan untuk kepentingan kekuasaan. Menurutnya Pengetahuan dan

Kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik terhadap kekuasaan. Penyelenggaraan kekuasaan terus menerus akan menciptakan entitas pengetahuan, begitu pun sebaliknya penyelenggaraan pengetahuan akan menimbulkan efek kekuasaan. Kemudian telah di justifikasi seperti apa yang dijelaskan oleh Linda Tuhiwai Smith yang berjudul *Dekolonialisasi Metodologi* dengan pendekatan orientalismenya dan poskolonialismenya yang menyatakan bahwa kolonialisme dan imperialisme tetap hidup dan menular lewat ilmu pengetahuan barat yang mendorong adanya pembaharuan di bidang pendidikan barat bagi pribumi. Sehingga praktik hidup dalam menanamkan imperialisme akan tetap ada hingga hari ini di Negara koloni.

Demikian pula dengan kondisi di Indonesia pasca tahun 1965 telah terjadi de-Sukarnoisasi yang memendam rapat-rapat cita-cita proklamator Bung Karno. Hal tersebut juga terjadi pada kampus sebagai ruang-ruang akademis dalam mencari ilmu pengetahuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dr. Abdul Wahid menyatakan adanya sebuah “genosida intelektual” yang menyingkirkan kaum-kaum progresif termasuk salah satunya kaum Sukarnois keluar dari kampus melalui proses *screening*. Selanjutnya ilmu pengetahuan di arahkan kepada hal-hal yang menunjang kehidupan kapitalisme. Hal ini dibuktikan dari tulisan Pranoto dan Hendrajit, 2015 yang berjudul –perang asimetris dalam tulisannya mereka melihat pakar sosiologi Amerika Serikat, Talcot Parson yang hadir ke Indonesia pada tahun 1970 untuk menyebarkan modernisme. Hadirnya Sosiolog Amerika serikat ini membawa perubahan lanskap pengetahuan Indonesia ke arah developmentalisme yang bertujuan untuk mengamankan kapitalisme global.

Keberadaan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) merupakan arahan yang dapat digunakan untuk meretas permasalahan

keberpihakan ilmu pengetahuan yang selama ini berpihak kepada kepentingan segelintir orang dan kapitalisme. Karena PNSB memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur alias Sosialisme Indonesia. Untuk itu, PNSB berpijak pada dua tugas pokok revolusi nasional di lapangan ekonomi, yaitu:

1. mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang bebas dari imperialisme dan eksploitasi asing lainnya;
2. mengubah ekonomi nasional menjadi ekonomi pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar mewujudkan Sosialisme Indonesia dan Trisakti Bung Karno.

Dari sudut pandang inilah memasukkan Pembangunan Nasional semesta Berencana yang dapat sebagai dasar pijakan dalam mengamalkan arah perjuangan keilmuan merupakan salah satu *retooling* dalam bidang keilmuan yang dapat dilakukan oleh GMNI yang merupakan representasi mahasiswa nasionalis.

Dalam perjalanannya, GMNI sebagai entitas politik juga masih ada pula yang terus mereproduksi arus besar paradigma yang dilakukan oleh kapitalisme global bahkan ada pula yang menerima mentah-mentah. Berdasarkan analisa situasi dan kondisi GMNI menyatakan bahwa lemahnya tradisi intelektual para kader yang di tandai lemahnya teori dan praktik baik di lapangan organisasi dan lingkungan rakyat yang tidak saling wahyu-mewahyui.

GMNI sebagai wadah kaum intelektual organik yang selalu dituntut untuk progresif-revolusioner dalam pemikiran dan tindakan baik secara organisasi dan kader sebagai perwujudan ideologi. Terlebih lagi hari ini tengah-tengah relativisme ilmu pengetahuan atas melimpahnya arus

informasi maka dibutuhkan subjektifikasi organisasi agar tetap selalu menjaga arah perjuangan. Oleh karena itu GMNI selalu berupaya untuk meningkatkan intelektual para kadernya salah satunya dengan merumuskan arah perjuangan dalam bidang-bidang keilmuan sebagai berikut:

Bidang Keilmuan	Arah Perjuangan
Politik	Menguatkan peran serta dan kesadaran rakyat Indonesia dalam memperoleh hak-hak ekonominya politiknya dalam kebijakan yang bersendikan Trisakti bung Karno.
Ekonomi	Merumuskan konsepsi ekonomi nasional dan meningkatkan daya juang rakyat Indonesia dalam bidang ekonomi & politik untuk mewujudkan Trisakti Bung Karno.
Budaya	Melestarikan kebudayaan lokal dan mereproduksi kebudayaan nasional untuk menciptakan persatuan nasional dalam mewujudkan Trisakti Bung Karno.
Hukum	Mendorong keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dan peraturan hukum yang bersendikan Pancasila.
Pendidikan	Membina karakter masyarakat

	Indonesia pada pendidikan formal dan informal dalam menciptakan <i>nation and character building</i> .
Sejarah	Meluruskan kembali sejarah dalam menguatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap entitas nasionalis.
Filsafat	Merumuskan cara berpikir dan mengejawantahkan konteks dan konsep tentang pemikiran ideologi marhaenisme agar diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keagamaan	Merumuskan konsepsi dan mendorong hubungan antara agama dan negara dalam mewujudkan persatuan Indonesia pada pembinaan karakter.

Gambaran penjabaran ini merupakan suatu usaha bersama yang dilihat berdasarkan kondisi realitas yang berasal dari keberadaan di *grass root* GMNI yaitu tipologi DPK. Hal ini dilakukan sebagai sarana pembinaan para kader dalam berorganisasi tanpa menghilangkan watak intelektual yang selalu mengorganisir rakyat. Sehingga para kader GMNI selalu setia pada rel progresif-revolusioner secara substantif, bukan hanya perkataannya orang jual kecap seperti pidato Bung Karno di GSNI pada 20 Februari 1966 .

Lebih lanjut, peran ilmu pengetahuan tidak bisa dilepaskan dari kaum intelektual. Intelektual merupakan orang yang menguasai l pengetahuan dan bertanggung jawab atas jalanya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi GMNI kaum intelektual memang bukan satu-satunya golongan yang paling bertanggung jawab mengatasi persoalan kebangsaan. Akan tetapi, pengelola negara dan pembuat kebijakan adalah orang yang rata-rata dapat dipastikan berangkat dari lokus intelektualitas. Jika bangsa ini rusak, kelompok intelektual sudah barang tentu menjadi tertuduh pertama. Mengingat, sosok intelektual senantiasa digadang-gadang menjadi pionir utama dalam menapaki perubahan.

Peran intelektual bagi GMNI sejatinya adalah memberi kritik konstruktif-transformatif tanpa kehilangan watak progresif-revolusionernya diruang sosial dalam memperjuangkan praktik hidup rakyat Indonesia yang berdasarkan Trisakti Bung Karno. Sebab, kritik adalah mekanisme efektif untuk menjalankan kontrol. Sasarannya bisa kekuasaan, bisa pula rakyat sendiri. Ia bernilai positif untuk mendorong sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat untuk kembali ke kriteria yang dipandang ideal dan wajar.

Intelektual memang senantiasa akan bergulat dengan suprastruktur, yakni kekuasaan, modal, dan kebudayaan seperti yang tampak dalam wacana-wacana yang dikemukakan. Isu-isu di tengah kaum intelektual lebih tersedot pada urusan parpol, pilkada, sampai konflik antar elite, dibanding membincang lebih jauh persoalan beras murah, kelangkaan minyak tanah, atau alternatif penyelesaian kasus lumpur Lapindo, permasalahan pasar tradisional yang semakin akut, dan terlebih tentang kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Berada dekat dengan kekuasaan dan politik bukanlah sebuah hal yang salah, tapi perlu diingat, dalam politik tidak ada istilah benar atau salah, yang

ada hanyalah menang atau kalah. Gramsci juga pernah berpendapat, intelektual tidak sepatutnya nonpartisan alias menjauhi kekuasaan. Intelektual tidak bisa kehilangan konteks, yakni relasi yang timpang antara penguasa dan rakyat. Relasi yang diwarnai penindasan dan kesewenang-wenangan.

Karena itu, intelektual tidak bisa steril dan bebas nilai. Mereka harus bersikap dan menentukan posisi, berada bersama rakyat yang ditindas (Idealis) dan karenanya membangun wacana *counter hegemony*, atau berada di posisi penguasa dan karenanya kreatif memproduksi hegemoni sehingga ide dan gagasan penguasa bisa diterima oleh publik. Gramsci menyebut intelektual model ini sebagai *organi cintellectuals*. Tanggung jawab mereka adalah membangun cara pandang dunia yang—baru untuk menyatukan lapisan bawah (masyarakat) dengan lapisan atas (penguasa). Dengan demikian masyarakat akan setuju dengan gagasan penguasa dan sebaliknya penguasaan atas masyarakat dapat di langgengkan. ada tiga hal prinsipil yang perlu diperhatikan dalam menanggapi Pancalogi GMNI yang berisi ideologi, revolusi, organisasi, studi dan integrasi yaitu:

1. Komitmen kebangsaan yang pernah diletakkan *founding fathers* tentang pentingnya sikap mengedepankan nasib dan kebutuhan rakyat daripada memikirkan kepentingan sendiri. Pandangan *mainstream* saat ini masih memantapkan intelektual di posisi terdidik yang memiliki peran penting dalam setiap perkembangan masyarakat. Karenanya, komitmen kebangsaan adalah sikap yang harus dipegang teguh secara konsisten;
2. Kepekaan atas setiap arah gerak perubahan yang berimplikasi langsung pada masyarakat. Intelektual senantiasa dituntut tanggap menyikapi

situasi kebangsaan, terutama atas situasi akhir-akhir ini yang rawan potensi konflik dan disintegrasi;

3. Memprioritaskan kemaslahatan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Intelektual sejati senantiasa bervisi membawa bangsa ke arah yang lebih baik, dan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kelompoknya sendiri, apalagi sekadar material *reward* (keuntungan materi).

Langkah pemikiran tindakan mengaplikasikan keilmuan maka perlu dibuat lembaga dalam menunjang keilmuan dalam pengamalan dan pengalamannya dalam keseharian hidup rakyat Indonesia . Serta membutuhkan simposium-simposium untuk menerjemahkan dan merumuskan permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia.